



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGENG APRIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **131280**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.958.947.350

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 8.505.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 180.180.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 180.180.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.219.575.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 240.600.000
6. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 52.035.200
7. Tanah Seluas 2821 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 14.246.050
8. Tanah Seluas 2854 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 20.406.100
9. Tanah Seluas 142 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 22.560.000
10. Tanah Seluas 2066 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 20.660.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 193.000.000



1. LAINNYA, --- (3 BUAH SEPEDA) SEPEDA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S A/T / MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.369.044.400

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 360.191.937

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.881.183.687

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.881.183.687

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.